

Bogdan dan Taylor dalam Barowi dan Suwandi, 2009: 21

Bayu Seto Hardjowaho Nomor 2006, Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku ke I

Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 17.

Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal.

15

Hazairin, 1961. Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Tintamas, Jakarta 1961

Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No.3 Tahun 2006, hal.50.

Hilman Hadikusuma, Op.cit., hal 176

Ichjanto, 2003 Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia Cet.1, Jakarta

K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.41

M. Yahya Harahap, 1975. Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading, Medan

Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, Halaman 36 Regeling op de Gemengde Huwalijken S. 1898 No. 158, yang terkenal dengan singkatan G.H.R

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1994. Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan di Indoensia, Airlangga University Press, Surabaya.

Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Peratutran Perkawinan Campuran, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal 2

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 2010

Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14.

Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi, (Jakarta, Raja GrafindoPersada, 1997, Halaman 36

Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Cetakan ke II, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2004, hal . 103.

Yudie Reza Haryansyah, Pelaksanaan UUP Tentang Perkawinan Terhadap Perceraian Pada Perkawinan Campuran, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 54-59

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1994 tentang visa izin masuk dan izin keimigrasian.

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan

C. Internet

<http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>

http://www.kompasiana.com/honny/tiga-faktor-utama-penyebab-perceraian_54ffc1eba33311d96450fabb

<http://pikirdong.org/efek-perceraian-pada-anak/>

<http://www.baliexpat.com/>

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/perkawinan-campuran-2.html>

<http://www.legalitas.org/node/305>

<http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/09/status-hukum-anak-hasil-perkawinan.html>

http://media.iyaa.com/article/2015/03/3389693_8553.html

